



LPPD TAHUN 2018

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2019**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Laporan ini dilaksanakan sebagai salah satu pertanggungjawaban dimana Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, 4 Maret 2019

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. FERY INSANI
19700620 199903 1 009

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Di usia yang ke 18 (delapan belas) tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan "*Bumi Serumpun Sebalai*" ini, mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

a. Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

b. Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;

- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

c. Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

d. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

e. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

f. Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak dimanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel I.1.

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Pertanian Sawah	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771	25.058
Tegalan	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038
Ladang	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435
Perkebunan	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064
Hutan Rakyat	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315
Pengembalaan	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987
Lain-Lain (pekarangan)	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810
Permukiman	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414	1.664.018

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 489.080 Ha dan perkebunan sebesar 391.064 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian

pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.

- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;

- b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha;
dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
- c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
 - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
- d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan

prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium. Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan

Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;

- b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
- b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
- b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
- b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
- b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

(8) Kawasan peruntukan lainnya

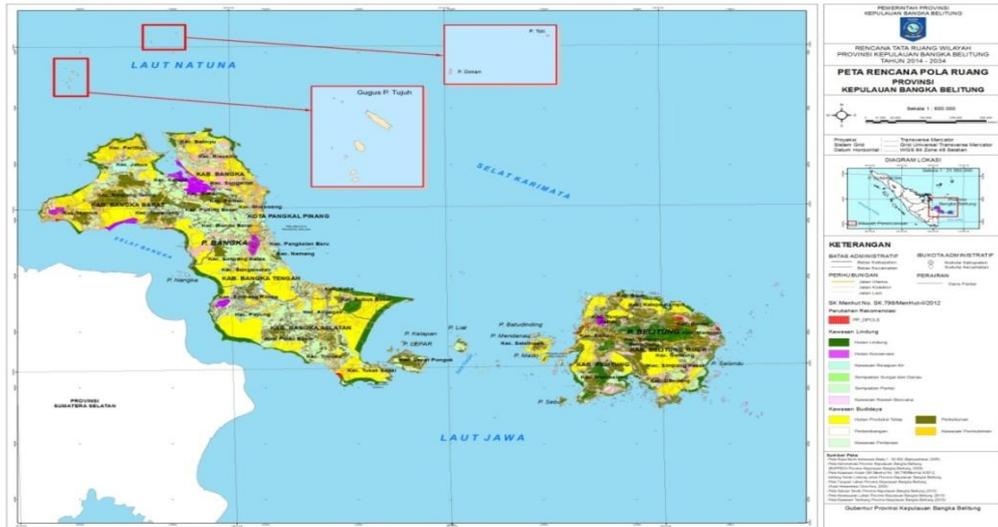
Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- a. Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- c. Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Semua kawasan peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

Gambar I.1

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar I.2

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

C. Gambaran Umum Demografis

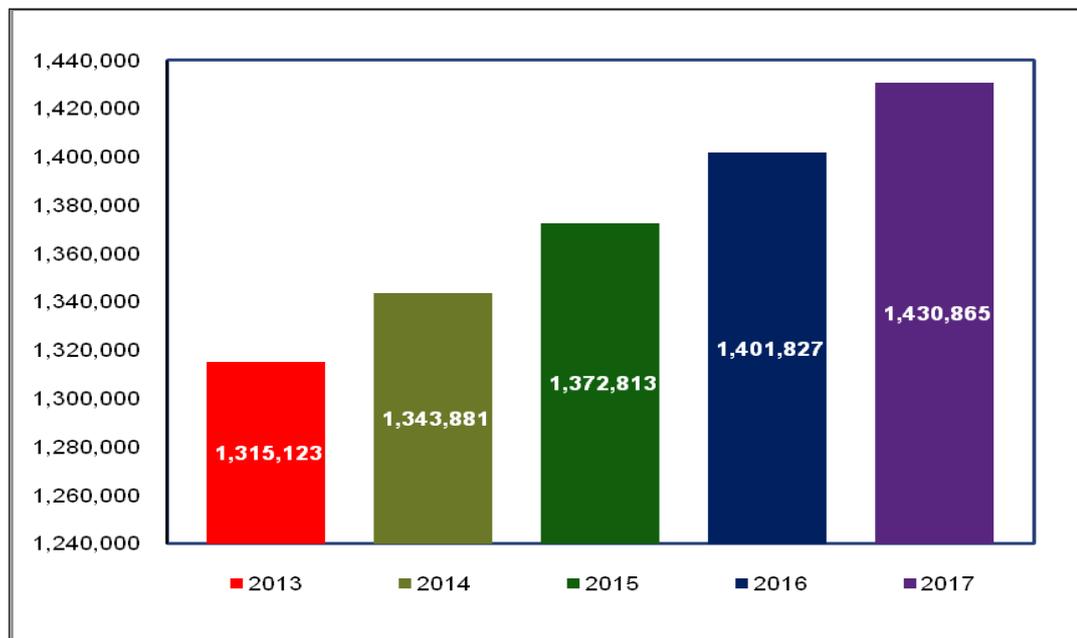
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
Kepulauan Bangka Belitung	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Grafik I.1
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Pada tahun 2013 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.315.123 jiwa dan meningkat menjadi 1.430.865 pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka

kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

Tabel I.3

Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	1.174.938
I.1.	Lahan Sawah	25.058
	a. Irigasi	4.234
	b. Tadah hujan	17.878
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.149.880
	a. Tegal	99.038
	b. Ladang	27.435
	c. Perkebunan	391.064
	d. Hutan rakyat	43.315
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	55.987
	g. Lain-lain	529.810
II.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	489.080
	a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	489.080
	Jumlah	1.664.018

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 3,36% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4
Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	189.965	184.276,95
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.473	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

Tabel I.5
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	199.241,40	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	2.939,12	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 tercatat sebesar 3.844,97 ton. Produksi ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.618,87 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 208.019,7 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 196.704,00 Ton dimana jumlah produksinya 196.704,00 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Potensi Pertambangan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

Tabel I.6
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.4 berikut.

Gambar I.3
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel I.7

Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279	384.596
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143	7.497
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422	390.465

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 238.405 orang meningkat di tahun 2014 menjadi 372.763 orang dan pada tahun 2018 sebesar 390.465 orang.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun

rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Tabel I.8

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010=100)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (miliar rupiah), 2014-2018

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal ini diharapkan pada tahun mendatang kondisi perkeonomian semakin lebih meningkat.

1.) Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel I.9 dan Tabel I.10. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan,

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian.

Tabel I.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014 –2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalian	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik, gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7
Pengadaan Air	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estate	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7
Jasa Lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
Produk Domestik Regional Bruto	56.373,6	60.987,3	65.048,2	69.861,2	73.069,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel I.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.7	8.254.3	8.743.5	9.116.9	9.083.8
Pertambangan dan Penggalian	6.230.2	6.354.1	6.458.1	6.491.1	6.633.0
Industri Pengolahan	10.143.3	10.270.4	10.400.6	10.688.4	11.363.1
Pengadaan Listrik, gas	31.5	35.6	38.9	43.7	45.9
Pengadaan Air	7.3	7.7	8.1	8.6	9.4
Konstruksi	3.414.7	3.552.4	3.760.1	4.021.6	4.252.1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	5.846.6	6.139.5	6.402.1	6.727.7	7.259.8
Transportasi dan Pergudangan	1.484.8	1.570.8	1.662.3	1.752.3	1.892.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931.0	1.000.6	1.034.8	1.086.5	1.136.5
Informasi dan Komunikasi	740.2	790.9	849.0	926.9	1.002.8
Jasa Keuangan	728.3	766.6	807.9	860.0	881.3
Real Estate	1.312.6	1.403.9	1.442.0	1.494.8	1.572.5
Jasa Perusahaan	108.1	115.7	120.3	120.4	127.5
Administrasi Pemerintahan	2.014.4	2.149.8	2.337.1	2.478.7	2.604.2
Jasa Pendidikan	903.7	964.9	1.059.1	1.139.3	1.183.3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.3	500.6	533.8	559.6	605.4
Jasa Lainnya	261.0	281.7	304.6	334.4	354.9
Produk Domestik Regional Bruto	42.190.9	44.159.4	45.962.3	47.850.8	50.007.8

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

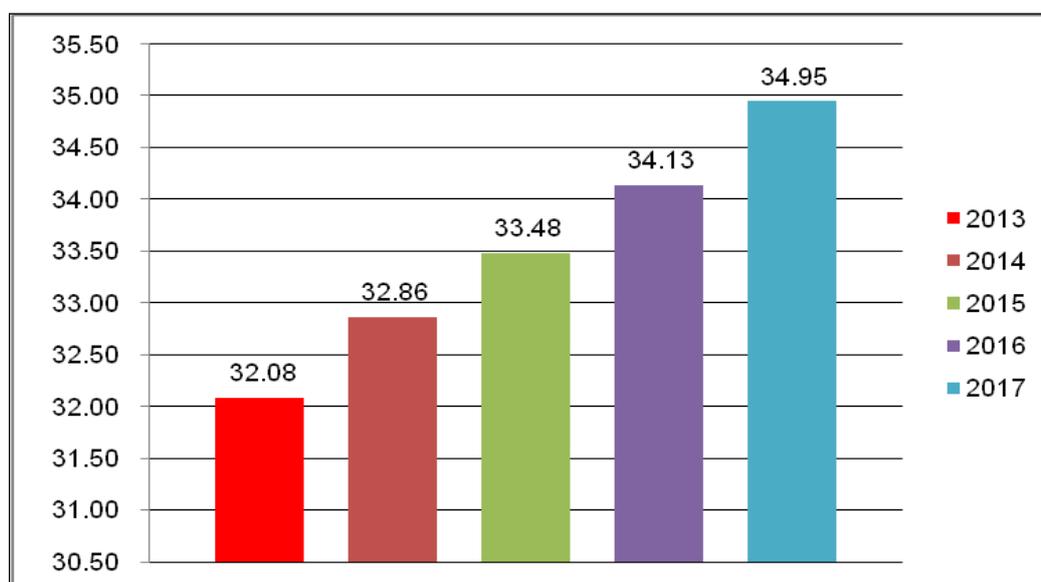
2.) PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik I.3.

Grafik I.3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. **Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;**
Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. **Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. **Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
 - b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)

- Ketersediaan Air Baku (M3)
- Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)

- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Air
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

- a) **Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
 2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanani;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
 - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

b) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
 - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

c) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
 - b. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
 - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
 - a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

d) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.

- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
 - e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.
- e) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
 - c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
 - e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
- f) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
- g) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
- h) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
- i) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

j) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

k) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

l) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

m) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

n) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

o) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
- p) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
 - d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
- q) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
 2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
 3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
 4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
 5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
- r) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
 2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
- s) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat

2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
 - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
 - e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

t) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

u) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

v) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan

Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

D. TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tahun 2018, Tema Proritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Proritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Proritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

Tabel. II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatkan produksi sub sektor perikanan	2 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatkan produksi sektor pertambangan	4 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5 Meningkatkan pembangunan berbasis industri	5 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatkan belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		2 Pendapatan perkapita masyarakat	1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran
			2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	3 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas				
3	Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya daerah irigasi (ha)
				2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
				2 Persentase kawasan permukiman yang tertata
				3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
				2 Persentase armada pengangkutan
				3 Persentase jalan kondisi mantap

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
			berkualitas	Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil
				1 Skor aspek hak-hak politik
				1 Skor aspek lembaga demokrasi
Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel.II.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan peternakan
	2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
			5 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
			6 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
			7 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan
3 PENGEMBANGAN PARIWISATA	3 Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata		

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			pariwisata
			8 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
			9 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
	4 PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
		5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
		6 Terwujudnya kemandirian energi	12 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
2 Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	5 PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13 Meningkatkan pendapatan asli daerah
	6 PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8 Menurunnya angka Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
		9 Menurunnya angka kemiskinan	15 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10 Menurunnya angka Inflasi	16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7 PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	12 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			19 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			21 Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			24 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
			25 Meningkatkan aksesibilitas
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal			
4 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	8 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26 Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
			27 Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat			
5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9 PEMBANGUNAN KESEHATAN	16 Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
6 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10 PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
			30 Peningkatan tata kelola pengawasan
			31 Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
			32 Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
			33 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
		18 Birokrasi yang efektif dan efisien	34 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			35 Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
		19 Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
			37 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7 Terwujudnya pembangunan demokrasi	11 PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38 Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
			39 Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
			40 Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
8 Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12 PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21 Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			42 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	13 PENEKNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22 Peningkatan Kualitas Lingkungan	43 Meningkatkan kualitas air
			44 Meningkatkan kualitas Udara
			45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			46 Meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

BAB III

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)

Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya) yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan) adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

- a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 - Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Program
 - Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
 - Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
- d. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
 - Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
- e. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 - Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
 - Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
 - Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

- f. Program Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
 - Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - Penguatan Jaringan Kelitbangan
 - Kajian Science Technology Park
 - Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

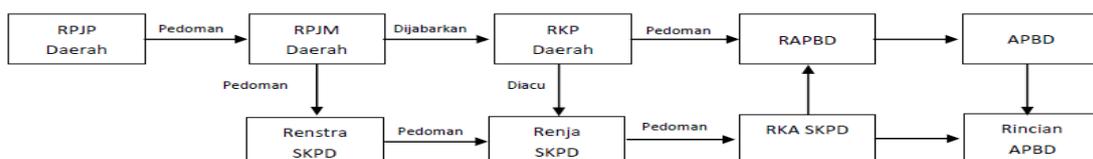
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	9	-	9
		Gol. III	53	-	53
		Gol. II	9	-	9
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	4	-	4
		S2	20	-	20
		S1/D. IV	37	-	37
		D. III	3	-	3
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	13	-	13
		Fungsional:			
		Tertentu	25	-	25
		Umum	26	-	26
JUMLAH TOTAL			71	-	71

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.575.263.550	1.462.661.000	8.766.662.509	685.300.000	22.489.887.059	17.043.459.079	83,35	Bappeda

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada BAPPEDA :

- Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan.
- Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
- Belum optimalnya kualitas SDM Bappeda.
- Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
- Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.
- Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan dominasi pejabat struktural lebih besar daripada pejabat fungsional tertentu (Perencana, Peneliti, Statistisi) dalam proses perencanaan

Solusi

- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data.
- Mengembangkan aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan.
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan
- Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

- Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Focus Group Discussion* dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
- Memberi peran dan akses yang lebih kepada para pejabat fungsional tertentu untuk terlibat dalam berbagai kesempatan yang akan memperkaya wawasan dan pengalaman yang diperlukan dalam perencanaan.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak ----- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan , sebanyak -----daerah. Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah. %	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2016 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017= ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 = -----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018.	Tepat / Tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2017 - Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor---- tanggal ----- 2017	- Tepat/ tidak - Tepat/ tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan Normalisasi
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib	1) Kab/Kota ----- = ----- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ----- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ----- urusan. urusan	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
				pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) $\frac{\text{Dst ..}}{\text{Jumlah}} = \text{----- urusan}$ Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot.		3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
		Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2017)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas pembangunan nasional</u> ¹	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPd), sebanyak 6 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 10 program	60%	Sumber data dari BAPPEDA/ perangkat daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	1) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) $\frac{\text{Dst ..}}{\text{Jumlah}} = \text{----- urusan}$ Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot. %	
		Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2017 (31 Desember 2016)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 15 Tahun 2017 tentang - -----APBD Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Desember 2017	Tepat/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat , apabila APBD ditetapkan setelah 31

¹ Program prioritas pembangunan nasional: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;(2)Pengurangan kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif; (4)Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air ; dan (5) Stabilitas Keamana Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
							Desember 2017.
		11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
		12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) Urusan Tata Ruang Rp. ---- 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. ---- 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. - ---- 6) Urusan Sosial Rp. ---- Total Belanja pelayanan dasar Rp. ---- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. --- -- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. --- -- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda	Ada atau tidak ada standar pelayanan	Apabila ADA:	Ada/tidak	Sumber data dari

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
				tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ² sesuai dengan peraturan perundang-undangan	publik	Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ---- -- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')		Bagian Hukum
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2017 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2017 sebanyak ----- orang-	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	17	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah SKPD, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) <u>Lembaga Teknis lainnya</u> = ---- unit Jumlah perangkat daerah = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar Perda terlampir) Perda	Sumber data dari Bagian Hukum

² Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - RAPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak -----RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak ----- PERDA. 	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak-----keputusan %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- Pergub. %	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	<p>Perda yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 3) Dst. <p>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda.</p> %	Sumber data dari Bagian hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya -----dan. - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang ---	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. ----- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	- PAD APBD Tahun 2017, sebesar Rp - ---- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- -- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: ----- 	Opini tahun 2016 = ---- Opini tahun 2017= -----	Opini,; WTP/ <i>unqualified opinion</i>); WDP/ <i>qualified opinion</i>); TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak ----- temuan. %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
		Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ³	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari BPKAD

³ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
					X 100%	- Potensi PAD pada APBD Tahun 2017, sebesar Rp-----		
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% atau (PAD 2017-PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----- - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp.----- %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -----, 2) -----, 3) -----, 4) Dst -----. Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E-procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun ----- .	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERENCANAAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program		Tidak ditetapkan jumlah program nasional pada RKP 2017.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah antarkabupaten/Kota (RKPD) 2. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi 3. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/Kota 4. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/Kota 5. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi 6. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil RKPD	Ada 13 SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Provinsi 7. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil Restra PD Provinsi 8. SOP ttg Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Provinsi 9. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD 10. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Antar kabupaten/kota 11. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategisPD Lingkup Provinsi 12. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan daerah Lingkup Provinsi (RKPD) 13. SOP ttg Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan jangka Menengah daerah Lingkup Provinsi (RPJMD)		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 (Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJPD Provinsi	100%	Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 22 <ul style="list-style-type: none"> - Perencana Muda - Perencana Pertama - Stastisi Pertama - Penerjemah Pertama - Pranata Komputer Muda - Pranata Komputer Pertama - Pranata Humas Pertama - Peneliti Pertama - Arsiparis Terampil Pelaksana 	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS SKPD, sebanyak 71 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.329 personil 	$\frac{71}{5.329} \times 100\% = 1,332\%$	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 19 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. 	$\frac{19}{20} \times 100\% = 95\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. 	$20 \div 20 \times 100\% = 100\%$	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> Ada - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD 	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP		10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%mk	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program 	$6 \div 6 \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.	
Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah		11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 6 program. 	$6 \div 6 \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.	
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran		12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 6 program. 	$6 \div 6 \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 20.489.887.059,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11	20.489.887.059,00 ----- x 100% 2.596.704.155.898,11= 0,79%	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 560.312.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.043.459.079,00	560.312.000,00 ----- ----- x 100% 17.043.459.079,00 =3,29%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.506.090.000,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.818.990.881,00	506.090.000,00 -----x 100% 8.818.990.881,00= 5,74 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Rp.506.090.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 20.489.887.059,00	506.090.000,00 -----x 100% 20.489.887.059,00 = 2,47 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK	Tidak Ada/ Ada sebanyak 5 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Buku Inventaris Gabungan.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.207.376.202,00	0 ----- x 100% 21.207.376.202,00 = 0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1 Papan Pengumuman 2 Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (Website http://bappeda.babelprov.go.id)	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	URUSAN	No.	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
20	Statistik	53	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah yg menangani
		54	Buku "PDRB provinsi"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah yg menangani
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		3	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada	Ada Dokumen Perencanaan : Perubahan RPJPD 2005-2025	Sumber data dari BAPPEDA Perda Nomor 3 Tahun 2017
		4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada	Ada Dokumen Perencanaan : RPJMD 2017-2022	Sumber data dari BAPPEDA Perda Nomor 14 Tahun 2017
		5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada	Ada Dokumen Perencanaan : RKPD 2018	Sumber data dari BAPPEDA Pergub Nomor 34 Tahun 2017
		6	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	$\frac{\text{Penjabaran program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} = 100\%$	$\frac{203 \times 100}{203} = 100\%$	Sumber data Bappeda



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336